

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) dahulu sebatas penyediaan layanan pendidikan dengan sistem segregasi, hingga akhirnya pada saat ini muncullah paradigma baru pendidikan, dimana anak berkebutuhan khusus (ABK) memerlukan suatu bentuk pendidikan yang mengikutsertakan mereka didalam berbagai kegiatan dengan masyarakat luas. Layanan pendidikan yang dimaksudkan adalah mampu mengakomodir segala kebutuhan ABK tanpa adanya bentuk diskriminasi. Maka diterapkanlah suatu pendidikan inklusif diberbagai sekolah reguler, agar ABK dapat ikut serta mengoptimalkan kemampuannya bersama dengan anak-anak pada umumnya.

Pendidikan inklusif pada dasarnya sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan pendidikan untuk semua anak dengan fokus pada mereka yang rentan terhadap marginalisasi. Pendidikan inklusif diharapkan pendidikan bagi semua anak dapat terlaksana bukan hanya sebagai slogan tetapi dengan sungguh-sungguh mengayomi seluruh anak tanpa terkecuali. Semua sekolah harus menerima keberagaman setiap peserta didiknya tanpa memandang perbedaan dari segi fisik, emosi, sosial, agama, ekonomi, dan sebagainya. Untuk itulah, pendidikan yang terselenggara hendaknya memberikan jaminan bahwa setiap anak akan mendapatkan pelayanan dalam mengembangkan potensinya, yang sejalan dengan ideologi sistem pendidikan nasional.

Indonesia menuju pendidikan inklusif secara formal dideklarasikan pada tanggal 11 Agustus 2004 di Bandung, dengan harapan dapat menggalang sekolah reguler untuk mempersiapkan pendidikan bagi semua anak tanpa terkecuali. Sebuah fakta di negeri ini bahwa perbedaan seringkali menjadi hal yang dipertentangkan, didiskriminasikan bahkan dimarginalkan. Masyarakat terkadang belum terbiasa hidup berdampingan dengan sebuah kenyataan atau kondisi yang berbeda sehingga sulit rasanya menciptakan sebuah keadilan diberbagai bidang di negeri ini, termasuk keadilan dalam bidang pendidikan.

Khususnya di Kota Makassar pelaksanaan pendidikan inklusif telah dicanangkan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2005, yaitu dengan menguji cobakan 2 Sekolah Dasar (SD). Program uji coba tersebut mengembangkan 53 SD uji coba di Kabupaten dan Kota yang tersebar di 8 Kabupaten dan 2 Kota ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Provinsi melalui Sub Dinas Pendidikan Luar Biasa. Pada akhirnya dipilih 1 SD tiap kabupaten dan 2 Sekolah Dasar dimasing-masing kota yaitu Makassar dan Pare-pare sebagai percontohan pelaksanaan pendidikan inklusif. Hingga pada tahun 2011, berdasarkan SK (surat keputusan) Gubernur nomor: 188.4/PD4/049/2010 tentang penetapan dan pelaksanaan program pendidikan inklusif, SD, SMP, dan SMA se-Sulawesi Selatan saat ini berjumlah 203 sekolah yang tersebar di 11 kabupaten dan 2 kotamadya.

Pelaksanaan pendidikan inklusif di Sulawesi Selatan khususnya Kota Makassar telah menginjak 6 (enam) tahun. Dalam kurun waktu ini sudah menunjukkan perjalanan yang cukup panjang. Maka, sudah seharusnya

pelaksanaan pendidikan inklusif di Kota Makassar khususnya telah dilakukan evaluasi secara komprehensif. Berdasarkan hasil wawancara pada Iis Masdiana pada tanggal 2 Maret 2011 yang merupakan salah satu tim pengembang pendidikan inklusif di Kota Makassar mengatakan:

“belum pernah dilakukan evaluasi yang komprehensif terhadap sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif, belum adanya kejelasan sistem evaluasi sehingga hambatan-hambatan selama pelaksanaan pendidikan inklusi di sekolah tidak teratasi dan pencapaian nilai-nilai inklusi sekolah tidak teridentifikasi sehingga menjadi salah satu faktor penghambat pengembangan sekolah dalam menyukseskan pelaksanaan pendidikan inklusif”.

Berdasarkan hal tersebut maka, sudah seharusnya keterlaksanaan pendidikan inklusif di Kota Makassar dilakukan evaluasi demi terwujudnya cita-cita pendidikan inklusif. Proses evaluasi itu sendiri akan bermanfaat untuk melihat nilai-nilai inklusif yang telah terjadi pada Sekolah Dasar yang melayani siswa berkebutuhan khusus di Kota Makassar.

Secara teoritis, “keterlaksanaan pendidikan inklusif dapat dievaluasi dengan suatu indeks yang disebut *index for inclusion*” (Ainscow, 2000). Indeks inklusi merupakan sumber daya untuk mendukung program pengembangan sekolah. Indeks inklusi ini dibangun dari tiga dimensi, yaitu (1) dimensi Budaya (*creating inclusive cultures*), (2) dimensi Kebijakan (*producing inclusive policies*), dan (3) dimensi Praktik (*evolving inclusive practices*). Setiap dimensi dibagi dalam dua bagian, yaitu: Dimensi budaya terdiri atas bagian membangun komunitas (*building community*) dan bagian membangun nilai-nilai inklusif (*establishing inclusive values*). Dimensi kebijakan terdiri atas bagian pengembangan tempat untuk semua (*developing setting for all*) dan bagian melaksanakan dukungan

untuk keberagaman (*organizing support for diversity*). Sedangkan dimensi praktik terdiri atas bagian belajar dan memobilisasi sumber daya.

Penelitian ini bermaksud menggambarkan inklusivitas di Sekolah Dasar yang telah melaksanakan pendidikan inklusif selama 6 (enam) tahun di Kota Makassar. Sekolah Dasar dipilih, karena Sekolah Dasar merupakan jenjang pertama pelaksana pendidikan inklusif di Kota Makassar. Selain itu, Sekolah Dasar tersebut juga dapat melihat inklusivitas yang telah terbagun di sekolah tersebut. Inklusivitas yang dimaksud akan diungkap dengan menggunakan indeks inklusif yang memiliki 3(tiga) dimensi, yaitu; kebijakan, budaya, dan praktek di Sekolah Dasar pelaksanaan pendidikan inklusif di Kota Makassar yang dikembangkan oleh *Centre for Studies on Inclusive Education (CSIE)*.

Berdasarkan hal tersebut, maka untuk mengembangkan pendidikan inklusif yang lebih efisien, efektif serta berkesinambungan kearah yang lebih baik, maka perlu dilaksanakan evaluasi pelaksanaan pendidikan inklusif di Kota Makassar. Bila hal ini dibiarkan terus-menerus, tentunya akan sangat menghambat pengembangan pendidikan inklusif dan cita-cita mewujudkan pendidikan untuk semua hanya sebuah angan-angan belaka.

B. Identifikasi dan Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Pendidikan inklusif dalam beberapa tahun terakhir ini telah menjadi isu yang sangat menarik dalam sistem pendidikan nasional. Hal ini dikarenakan pendidikan inklusif memberikan perhatian pada pengaturan para siswa yang memiliki kelainan atau kebutuhan khusus untuk bisa mendapatkan pendidikan

pada sekolah-sekolah umum atau reguler sebagai ganti kelas pendidikan khusus atau sekolah luar biasa. Inklusi adalah suatu sistem ideologi dimana secara bersama-sama tiap-tiap warga sekolah yaitu masyarakat, kepala sekolah, guru, pengurus yayasan, petugas administrasi sekolah, para siswa, dan orang tua menyadari tanggungjawab bersama dalam mendidik semua siswa sedemikian rupa sehingga mereka berkembang secara optimal sesuai potensi mereka.

Dalam pelaksanaannya begitu banyak tantangan yang harus diselesaikan khususnya di sekolah reguler dalam melaksanakan pendidikan inklusif. Berikut adalah beberapa masalah-masalah dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di Sulawesi Selatan khususnya di Kota Makassar, yaitu adalah membangun pemahaman guru dalam hal pendidikan inklusif. Hal ini menjadi langkah awal, agar dalam pelaksanaannya tidak melenceng dari filosofi pendidikan inklusif. Selanjutnya adalah sikap dan keyakinan yang belum positif kepala sekolah dan guru dalam memberikan pelayanan bagi peserta didik khususnya bagi ABK. Kemudian minimnya fasilitas pembelajaran yang disediakan oleh guru, kurangnya aksesibilitas sekolah dalam memenuhi kebutuhan ABK, Kurangnya pengalaman guru dalam mengikuti kegiatan tentang pelayanan bagi ABK di sekolah dalam setting pendidikan inklusif, terdapat juga kurangnya tenaga pengajar atau GPK di sekolah inklusif, siswa pada umumnya belum terbiasa menerima teman sebayanya yang memiliki disabilitas, kurangnya dukungan dari orangtua siswa pada umumnya yang merasa enggan bila anaknya digabungkan belajar bersama dengan anak ABK, dan belum maksimalnya dukungan dari masyarakat tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif. Selanjutnya yang paling esensial dalam

pelaksanaan pendidikan inklusif adalah proses evaluasi secara penuh dalam sebuah sekolah penyelenggara pendidikan inklusif.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah evaluasi pelaksanaan pendidikan inklusif pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah. Proses evaluasi ini bukan untuk menilai sekolah ataupun person, tetapi untuk menggambarkan inklusivitas pada Sekolah Dasar di Kota Makassar. Maka, rumusan masalah dalam penelitian adalah:

- a. Bagaimanakah inklusivitas ditinjau dari sikap guru terhadap pendidikan inklusif pada Sekolah Dasar di Kota Makassar?
- b. Bagaimanakah inklusivitas ditinjau dari pengalaman pelatihan guru pada Sekolah Dasar pelaksanaan pendidikan inklusi di Kota Makassar?
- c. Bagaimanakah inklusivitas ditinjau dari jumlah siswa di kelas pada Sekolah Dasar di Kota Makassar?
- d. Bagaimanakah inklusivitas ditinjau dari jumlah siswa berkebutuhan khusus di kelas pada Sekolah Dasar di Kota Makassar?
- e. Bagaimanakah inklusivitas ditinjau dari jumlah guru di kelas pada Sekolah Dasar di Kota Makassar?
- f. Bagaimanakah inklusivitas pada Sekolah Dasar di Kota Makassar?

C. Tujuan

1. Tujuan Umum

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran inklusivitas dari segi budaya, kebijakan, dan praktek pada Sekolah Dasar di Kota Makassar

2. Tujuan Khusus

Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang:

- a. Inklusivitas ditinjau dari sikap guru terhadap pendidikan inklusif pada Sekolah Dasar di Kota Makassar
- b. Inklusivitas ditinjau dari pengalaman pelatihan yang diikuti guru pada Sekolah Dasar di Kota Makassar.
- c. Inklusivitas ditinjau dari jumlah siswa di kelas pada Sekolah Dasar di Kota Makassar.
- d. Inklusivitas ditinjau dari jumlah ABK di kelas pada Sekolah Dasar di Kota Makassar.
- e. Inklusivitas ditinjau dari jumlah guru di kelas pada Sekolah Dasar di Kota Makassar.
- f. Inklusivitas pada Sekolah Dasar di Kota Makassar.

D. Manfaat

1. Secara teori hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberi masukan atau sumbangan berupa kajian konseptual tentang indeks inklusif yang berkaitan dengan implementasi pendidikan inklusif sehingga turut

memperkaya dan mempertajam kajian tentang pengembangan pendidikan Inklusif di Indonesia.

2. Secara praktis, diharapkan dapat memberikan penyajian empiris inklusivitas dari masing-masing Sekolah Dasar di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.

E. Struktur Organisasi Penelitian

Tesis ini terdiri dari 5 (lima) BAB. Dimana BAB I memuat tentang latar belakang, identifikasi masalah dan rumusan masalah, manfaat dan tujuan penelitian. BAB II memuat tentang kajian pustaka dan kerangka pemikiran. BAB III memuat tentang lokasi dan populasi penelitian, metode penelitian, definisi operasional, instrumen penelitian, validitas dan realibilitas, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. BAB IV memuat tentang hasil penelitian dan pembahasan. Terakhir BAB V memuat tentang kesimpulan dan rekomendasi.